

Katalog BPS : 7202002.73

Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

2013/2014

<http://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**STATISTIK KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2013/2014

<http://sulsel.bps.go.id>

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013/2014**

Kode Publikasi : 73542.0002

Ukuran Buku : 29 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : 43 + xii

Naskah : Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Gambar Kulit : Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak Oleh :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013/2014 merupakan hasil pengolahan dari Survei Keuangan Daerah Tingkat II (K2) yang dikumpulkan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Publikasi ini merupakan kelanjutan dari terbitan sebelumnya yang menyajikan data Realisasi penerimaan dan Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota tahun 2013, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun 2014.

Disadari bahwa publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, Agustus 2015

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
K e p a l a,

NURSAM SALAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
II. SUMBER DATA.....	1
III. KONSEP DAN DEFINISI	1
IV. ULASAN SINGKAT.....	9
LAMPIRAN.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp)	15
Tabel 1.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	16
Table 1.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	17
Tabel 1.4	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	18
Tabel 1.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	19
Tabel 1.6	Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	20
Tabel 1.7	Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	21
Tabel 1.8	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	22
Tabel 1.9	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	23
Tabel 1.10	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	24
Tabel 1.11	Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	25
Tabel 1.12	Realisasi Dana alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	26

Tabel 1.13	Realisasi Penerimaan Lain-Lain yang Sah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 (000 Rp).....	27
Tabel 1.14	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	28
Tabel 2.1	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	29
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)	30
Tabel 2.3	Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	31
Tabel 2.4	Realisasi Belanja Bunga Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	32
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	33
Tabel 2.6	Realisasi Belanja Hibah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	34
Tabel 2.7	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	35
Tabel 2.8	Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	36
Tabel 2.9	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)	37
Tabel 2.10	Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp).....	38
Tabel 2.11	Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)	39

Tabel 2.12	Realisasi Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)	40
Tabel 2.13	Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Dari Belanja Langsung Kabupaten/ Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)	41
Tabel 2.14	Tabel 2.14. Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Sulawrsi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)	42
Tabel 2.15	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)	43

DAFTAR TABEL

Tabel A	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Selatan TA 2012 – 2014	9
Tabel B	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan TA 2013 – 2014.....	10
Tabel C	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan TA 2013 – 2014.....	11
Tabel D	Realisasi Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan TA 2013 – 2014.....	12
Tabel E	Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Pengeluaran TA 2013 – 2014.....	13

I. PENDAHULUAN

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada era reformasi semakin dituntut serta mendapat porsi yang semakin besar. Hal ini terutama berkaitan dengan program otonomisasi daerah yang telah mulai diterapkan di berbagai daerah Kabupaten/Kota.

Penanganan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus semakin efektif dan efisien. Untuk itu, statistik keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota semakin diperlukan terutama untuk digunakan :

- 1) Sebagai bahan penghitungan PDRB neraca ekonomi baik tingkat daerah maupun PDB pada tingkat nasional, tabel input-output dan neraca arus dana.
- 2) Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 3) Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana masing-masing daerah.
- 4) Sebagai informasi bagi pemerintah pusat untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.

II. SUMBER DATA

Data dalam publikasi ini diperoleh melalui Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yang terdiri dari :

- 1) Realisasi penerimaan daerah otonomi Kabupaten/Kota menurut sumber penerimaan selama tahun anggaran 2013 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014.
- 2) Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dirinci menurut jenis pengeluaran selama tahun anggaran 2013 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014.

III. KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian keungan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan meliputi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota. Konsep dan definisi tersebut sudah baku sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. berikut ini beberapa penjelasan dan definisi dalam daftar isian K2.

PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan daerah yang bersangkutan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan c, parkir, dan lain-lain.

Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perijinan tertentu meliputi retribusi ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi

Pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTPB), Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Waib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh Pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai

pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Bunga

Adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi

Adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membiayai produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Belanja Bantuan Sosial

Adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintha desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintha daerah pemberi bantuan.

Bantuan Keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan Keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah desa.

Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan pengadaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus

hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penertiban obligasi daerah yang direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

IV. ULASAN SINGKAT

Langkah dan upaya pemerintah dalam menggalakkan otonomisasi daerah di tingkat Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah untuk mendorong gerak roda pembangunan di daerah yaitu melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya lebih mendorong pertumbuhan perekonomian daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dikurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut lebih berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tabel A. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2014.

Tahun	Realisasi (Juta Rp)	Perubahan (%)
2012	17.426.464	10,11
2013	21.485.635	23,29
2014	23,085.955	7,45

Provinsi Sulawesi Selatan selain sebagai pintu gerbang kawasan Timur Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama pertanian, pertambangan/penggalian dan pariwisata. Dengan letak geografis yang strategis dan dengan potensi alam yang dimiliki, program otonomisasi adalah menjadi suatu peluang untuk percepatan pembangunan daerah.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini pengelolaan APBD terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

4.1. PENERIMAAN / PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan daerah diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Peningkatan penerimaan daerah khususnya dari pos pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan menuju terwujudnya otonomisasi daerah yang lebih nyata.

Tabel B. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2013-2014 (000 Rp)

Uraian	2013	2014
A. Pendapatan Daerah	20.290.232.267	22,047,899,444
1. Pendapatan Asli Daerah	1.795.508.096	2,028,678,181
2. Dana Perimbangan	14.957.269.935	16,238,035,821
3. Lain-lain pendapatan yang sah	3.537.454.236	3,781,185,442
B. Pembiayaan Daerah	1.195.402.557	1.038.055.872
Total Penerimaan Daerah	21.485.634.824	23.085,955,316

Total penerimaan Pemerintah Daerah Se Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun anggaran terakhir secara riil terus mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2014 realisasi penerimaan sebesar 23.085.955 juta rupiah meningkat sebesar 7,45 persen dibanding keadaan tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pada tahun anggaran 2013 diperoleh penerimaan sebesar 21.485.635 juta rupiah atau meningkat sebesar 23,29 persen dibanding total penerimaan pada tahun anggaran 2012 .

Secara umum, sumber pendapatan daerah terdiri dari beberapa jenis penerimaan, namun secara garis besar dapat dirinci dalam 3 kelompok sebagai berikut :

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

.Besarnya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menggali potensi yang dimilikinya. Jumlah dan peningkatan penerimaan dari PAD tersebut akan memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara lebih mandiri.

Tabel C. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2013-2014 (000 Rp)

Uraian	2013	2014
1. Pajak Daerah	895,767,174	979,501,437
2. Retribusi Daerah	430,512,125	477,507,326
3. Laba usaha daerah	91,119,933	105,853,752
4. Lainnya	378,108,864	465,815,566
Pendapatan Asli Daerah	1,795,508,096	2,028,678,181

Pada tahun anggaran 2014, PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan adalah sebesar 2.028.678 juta rupiah, Dari jumlah tersebut, retribusi daerah dan pajak daerah merupakan kontributor utama, keduanya pada tahun anggaran 2014 menempatkan retribusi daerah mencapai sebesar 477.507 juta rupiah (25 %) dari total PAD, dan pajak daerah sebesar 979.501 juta rupiah (48 %) dari total PAD.

Bagian dari PAD yang menunjukkan kenaikan yang sangat besar adalah dari penerimaan lainnya yang naik sebesar 23,20 persen yaitu dari 378,108,864 ribu rupiah pada tahun 2013 menjadi 465,815,566 ribu rupiah pada tahun 2014.

4.1.2. Bagian Dana Perimbangan

Tabel D. Realisasi Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Pemda Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2013-2014 (000 Rp)

Uraian	2013	2014
1. Bagi Hasil Pajak	832.974.506	757.659.802
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	71.537099	70.621.100
3. Dana Alokasi Umum	12.665.298.573	13.931.816.229
4. Dana Alokasi Khusus	1.387.459.757	1.477.938.690
Jumlah	14.957.269.935	16.238.035.821

Penerimaan terbesar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berasal dari penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi, pada tahun anggaran 2013 sebesar 14,957,269.935 ribu rupiah menjadi 16,238,035.821 ribu rupiah pada tahun anggaran 2014 atau meningkat sebesar 8,56 persen. Kontribusinya terhadap total penerimaan, pada tahun anggaran 2013 sebesar 73,72 persen, pada tahun anggaran 2014 sebesar 73,65 persen.

Dari bagian Dana Perimbangan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi yang menunjukkan kenaikan yang sangat besar adalah dari Pendapata Asli Daerah yaitu sebesar 12,98 persen yaitu dari 1.795.508.096 ribu rupiah pada tahun 2013 menjadi 2.028.678.181 ribu rupiah pada tahun 2014.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dibandingkan dengan keadaan pada tahun anggaran 2013, maka tahun anggaran 2014 kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap total penerimaan mengalami kenaikan sebesar 6,89 % yaitu dari 3,537,454.236 ribu rupiah pada tahun 2013 menjadi 3,781,185.442 ribu rupiah pada tahun 2014.

4.2 . PENGELUARAN DAERAH

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 Pengeluaran daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sedang format lama terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan. Sedangkan pengeluaran pembangunan diantaranya adalah pengeluaran untuk sektor industri, transportasi, tenaga kerja, dsb.

**Tabel E. Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
Se Sulawesi Selatan TA 2013-2014 (000 Rupiah)**

Uraian	2013	2014
1. Belanja Tidak Langsung	10.660.998.785	12.136.595.968
2. Belanja Langsung	8.426.108.378	10.485.141.334
3. Pembiayaan Daerah	2.312.290.983	464.218.014
Jumlah	21.399.398.146	23.085.955.316

Pada tahun anggaran 2014, total pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 23,085,955,316 ribu rupiah, dimana 12.136.595,968 ribu rupiah (52,57 persen) diantaranya adalah merupakan pengeluaran/belanja Tidak Langsung Daerah 10,485,141,334 ribu rupiah (45.42 persen) adalah pengeluaran/belanja langsung Pemda TK II se Sulawesi Selatan dan 464,218,014 ribu rupiah (2,01 persen) adalah Pembiayaan Daerah.

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	642,137,799	711,383,630
2	Bulukumba	964,391,399	1,022,219,326
3	Bantaeng	578,111,400	612,149,425
4	Jeneponto	729,821,356	871,316,866
5	Takalar	745,552,595	809,086,269
6	Gowa	1,251,789,279	1,269,036,166
7	Sinjai	696,182,152	785,689,380
8	Maros	899,586,476	1,068,326,227
9	Pangkep	956,595,991	1,039,106,107
10	Barru	659,082,615	741,638,489
11	Bone	1,464,703,896	1,511,809,025
12	Soppeng	817,239,930	1,009,467,244
13	Wajo	1,103,918,592	1,113,989,090
14	Sidrap	745,905,101	883,107,707
15	Pinrang	886,771,573	951,940,781
16	Enrekang	641,911,044	729,900,379
17	Luwu	900,289,393	900,151,534
18	Tator	675,080,917	759,431,924
19	Luwu Timur*	948,270,038	991,168,591
20	Luwu Utara	738,997,495	814,888,551
21	Toraja Utara	635,116,991	698,763,576
22	Makassar	2,579,183,491	2,396,879,800
23	Pare-Pare	616,759,765	717,429,351
24	Palopo	608,235,536	677,075,878
Jumlah		21,485,634,824	23,085,955,316

Tabel 1.2..Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	608,033,442	654,195,097
2	Bulukumba	923,530,169	1,022,169,326
3	Bantaeng	556,110,766	590,148,791
4	Jeneponto	721,991,872	821,183,931
5	Takalar	708,532,907	807,086,269
6	Gowa	1,085,481,884	1,151,994,972
7	Sinjai	662,485,048	758,290,234
8	Maros	879,546,875	1,037,028,157
9	Pangkep	913,802,936	1,034,166,547
10	Barru	612,007,455	688,686,368
11	Bone	1,392,864,909	1,464,333,560
12	Soppeng	761,699,668	982,014,968
13	Wajo	1,019,202,525	1,049,138,571
14	Sidrap	745,706,402	822,665,152
15	Pinrang	856,676,699	921,845,666
16	Enrekang	639,914,149	705,799,719
17	Luwu	780,172,430	850,341,366
18	Tator	659,885,052	722,887,424
19	Luwu Timur*	842,910,150	933,961,929
20	Luwu Utara	729,425,755	807,650,517
21	Toraja Utara	621,559,874	695,763,576
22	Makassar	2,349,767,518	2,166,929,800
23	Pare-Pare	614,513,847	695,135,724
24	Palopo	604,409,935	664,481,780
Jumlah		20,290,232,267	22,047,899,444

Tabel 1.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	22,391,990	28,382,167
2	Bulukumba	38,003,889	52,485,268
3	Bantaeng	25,420,139	30,112,066
4	Jeneponto	16,617,581	44,188,987
5	Takalar	40,305,647	44,633,431
6	Gowa	109,776,246	107,044,621
7	Sinjai	24,044,536	26,063,336
8	Maros	79,513,862	120,206,000
9	Pangkep	101,835,960	102,128,214
10	Barru	38,904,237	34,053,882
11	Bone	85,874,602	100,116,236
12	Soppeng	40,096,284	89,715,772
13	Wajo	70,335,696	70,754,657
14	Sidrap	37,920,945	54,112,461
15	Pinrang	52,047,346	53,138,074
16	Enrekang	23,206,691	27,314,923
17	Luwu	33,620,252	31,403,783
18	Tator	38,776,669	36,540,054
19	Luwu Timur*	126,468,297	157,961,726
20	Luwu Utara	36,740,971	46,289,652
21	Toraja Utara	19,824,777	23,506,758
22	Makassar	609,655,622	608,955,576
23	Pare-Pare	72,462,126	86,131,561
24	Palopo	51,663,731	53,438,976
Jumlah		1,795,508,096	2,028,678,181

Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	2,457,848	3,307,000
2	Bulukumba	8,117,234	18,205,156
3	Bantaeng	4,183,081	3,295,950
4	Jeneponto	4,800,820	7,861,594
5	Takalar	4,115,632	5,504,845
6	Gowa	57,085,943	59,040,000
7	Sinjai	4,577,272	8,146,200
8	Maros	42,059,791	59,199,000
9	Pangkep	65,498,191	62,909,499
10	Barru	5,091,144	9,170,000
11	Bone	14,573,196	29,406,819
12	Soppeng	4,282,985	8,534,506
13	Wajo	10,089,663	18,875,500
14	Sidrap	8,303,005	15,263,469
15	Pinrang	9,469,550	12,178,728
16	Enrekang	3,413,931	4,966,000
17	Luwu	7,427,471	8,735,000
18	Tator	3,882,206	2,398,050
19	Luwu Timur*	79,350,458	90,139,000
20	Luwu Utara	5,816,818	9,346,772
21	Toraja Utara	6,589,276	8,320,926
22	Makassar	518,703,084	501,718,650
23	Pare-Pare	14,986,630	18,575,000
24	Palopo	10,891,945	14,403,873
Jumlah		895,767,174	979,501,537

Tabel 1.5.. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	2,653,681	9,017,358
2	Bulukumba	18,459,702	16,542,731
3	Bantaeng	12,934,535	16,903,456
4	Jeneponto	3,660,807	27,392,593
5	Takalar	25,650,221	31,181,376
6	Gowa	37,494,498	38,093,621
7	Sinjai	6,805,926	6,371,827
8	Maros	26,720,832	33,507,000
9	Pangkep	19,947,012	23,677,108
10	Barru	22,550,513	14,763,882
11	Bone	14,058,278	15,376,587
12	Soppeng	8,637,486	7,731,606
13	Wajo	22,082,599	21,021,727
14	Sidrap	21,227,958	26,254,556
15	Pinrang	6,229,569	5,785,794
16	Enrekang	9,329,296	12,467,500
17	Luwu	14,985,417	16,379,153
18	Tator	27,834,718	27,640,851
19	Luwu Timur*	18,321,764	12,191,228
20	Luwu Utara	25,569,648	8,416,664
21	Toraja Utara	6,980,065	8,265,714
22	Makassar	62,071,144	84,844,404
23	Pare-Pare	9,551,822	7,689,660
24	Palopo	6,754,634	5,990,930
Jumlah		430,512,125	477,507,326

Tabel 1.6.. Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	7,162,296	7,745,399
2 Bulukumba	962,101	1,000,000
3 Bantaeng	4,163,574	4,163,574
4 Jenepono	3,997,694	3,634,000
5 Takalar	5,387,358	4,850,000
6 Gowa	3,075,276	3,879,000
7 Sinjai	2,587,719	2,587,719
8 Maros	2,711,182	5,000,000
9 Pangkep	7,530,925	8,350,000
10 Barru	4,677,800	6,620,000
11 Bone	1,989,585	2,036,469
12 Soppeng	3,670,935	2,710,000
13 Wajo	5,838,956	5,838,956
14 Sidrap	3,699,111	4,700,000
15 Pinrang	6,237,068	6,275,000
16 Enrekang	2,770,422	2,770,423
17 Luwu	2,985,830	2,800,000
18 Tator	1,675,382	1,695,597
19 Luwu Timur*	6,402,946	10,000,000
20 Luwu Utara	1,078,216	1,078,216
21 Toraja Utara	1,161,156	1,500,000
22 Makassar	6,355,687	11,380,027
23 Pare-Pare	2,753,598	3,000,000
24 Palopo	2,245,116	2,239,372
Jumlah	91,119,933	105,853,752

Tabel 1.7. Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	10,118,165	8,312,410
2	Bulukumba	10,464,852	16,737,381
3	Bantaeng	4,138,949	5,749,086
4	Jeneponto	4,158,260	5,300,800
5	Takalar	5,152,436	3,097,210
6	Gowa	12,120,529	6,032,000
7	Sinjai	10,073,619	8,957,590
8	Maros	8,022,057	22,500,000
9	Pangkep	8,859,832	7,191,607
10	Barru	6,584,780	3,500,000
11	Bone	55,253,543	53,296,361
12	Soppeng	23,504,878	70,739,660
13	Wajo	32,324,478	25,018,474
14	Sidrap	4,690,871	7,894,436
15	Pinrang	30,111,159	28,898,552
16	Enrekang	7,693,042	7,111,000
17	Luwu	8,221,534	3,489,630
18	Tator	5,384,363	4,805,556
19	Luwu Timur*	22,393,129	45,631,498
20	Luwu Utara	4,276,289	27,448,000
21	Toraja Utara	5,094,280	5,420,118
22	Makassar	22,525,707	11,012,495
23	Pare-Pare	45,170,076	56,866,901
24	Palopo	31,772,036	30,804,801
Jumlah		378,108,864	465,815,566

Tabel 1.8. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	519,597,571	552,118,043
2	Bulukumba	687,582,170	758,799,846
3	Bantaeng	461,342,372	469,886,356
4	Jeneponto	599,305,500	638,700,321
5	Takalar	552,482,333	652,145,683
6	Gowa	766,810,946	846,993,960
7	Sinjai	548,356,688	593,268,895
8	Maros	626,203,966	719,808,366
9	Pangkep	680,680,612	735,493,268
10	Barru	484,054,131	537,835,198
11	Bone	1,022,606,590	1,084,716,799
12	Soppeng	598,157,577	767,979,937
13	Wajo	785,680,626	754,112,620
14	Sidrap	578,000,237	618,827,550
15	Pinrang	666,820,196	703,936,500
16	Enrekang	515,435,214	555,038,985
17	Luwu	625,469,748	676,632,778
18	Tator	521,032,009	559,984,943
19	Luwu Timur*	525,871,390	591,403,015
20	Luwu Utara	599,580,256	645,537,547
21	Toraja Utara	508,219,392	548,679,583
22	Makassar	1,161,280,548	1,249,540,839
23	Pare-Pare	455,852,713	476,229,281
24	Palopo	466,847,150	500,365,508
Jumlah		14,957,269,935	16,238,035,821

Tabel 1.9. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	21,607,246	23,000,000
2 Bulukumba	29,603,801	28,072,699
3 Bantaeng	26,904,669	35,365,817
4 Jeneponto	27,735,195	24,526,398
5 Takalar	12,629,235	4,750,000
6 Gowa	27,153,661	19,002,000
7 Sinjai	25,634,658	14,787,074
8 Maros	33,352,872	25,417,104
9 Pangkep	34,089,345	36,434,077
10 Barru	24,288,372	14,513,932
11 Bone	63,832,100	45,883,379
12 Soppeng	26,077,003	155,133,641
13 Wajo	117,928,497	57,208,584
14 Sidrap	35,046,333	32,514,438
15 Pinrang	27,977,896	17,756,910
16 Enrekang	28,530,956	18,820,991
17 Luwu	22,122,472	12,000,000
18 Tator	18,808,017	14,589,540
19 Luwu Timur	53,169,524	51,950,000
20 Luwu Utara	32,024,855	18,173,389
21 Toraja Utara	16,689,583	9,779,414
22 Makassar	85,548,578	68,743,722
23 Pare-Pare	24,744,284	15,946,645
24 Palopo	17,475,354	13,290,048
Jumlah	811,367,260	734,659,802

Tabel 1.10. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	1,574,872	1,290,000
2	Bulukumba	1,538,745	1,384,601
3	Bantaeng	1,260,187	1,343,023
4	Jeneponto	1,188,018	0
5	Takalar	11,822,487	18,067,600
6	Gowa	1,414,924	1,064,338
7	Sinjai	1,338,736	1,538,431
8	Maros	1,262,262	1,366,150
9	Pangkep	1,460,990	3,092,711
10	Barru	1,468,543	1,430,831
11	Bone	2,716,179	2,115,776
12	Soppeng	4,998,812	0
13	Wajo	2,021,602	2,305,146
14	Sidrap	1,423,001	901,952
15	Pinrang	1,443,749	847,500
16	Enrekang	1,453,738	1,179,009
17	Luwu	1,538,868	923,308
18	Tator	1,527,213	0
19	Luwu Timur*	22,817,615	21,038,671
20	Luwu Utara	1,723,115	2,384,946
21	Toraja Utara	1,468,245	4,452,761
22	Makassar	1,260,187	1,150,985
23	Pare-Pare	1,214,136	1,391,331
24	Palopo	1,600,875	1,352,030
Jumlah		71,537,099	70,621,100

T

Tabel 1.11. Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	421,256,593	458,019,013
2 Bulukumba	591,388,184	653,897,726
3 Bantaeng	379,463,356	379,463,356
4 Jeneponto	494,087,427	542,150,883
5 Takalar	479,073,701	565,195,363
6 Gowa	670,579,761	746,700,092
7 Sinjai	474,528,814	521,628,340
8 Maros	540,383,322	614,598,482
9 Pangkep	566,929,217	623,418,990
10 Barru	417,942,379	471,135,015
11 Bone	867,813,851	950,401,934
12 Soppeng	517,805,122	569,126,996
13 Wajo	592,275,827	631,247,160
14 Sidrap	499,699,573	533,655,220
15 Pinrang	574,244,531	629,285,550
16 Enrekang	436,542,180	484,907,285
17 Luwu	542,118,008	595,699,150
18 Tator	444,741,329	486,447,423
19 Luwu Timur*	410,974,651	462,819,314
20 Luwu Utara	512,644,776	573,100,112
21 Toraja Utara	404,597,214	448,417,228
22 Makassar	1,033,584,903	1,114,853,212
23 Pare-Pare	384,096,063	426,405,955
24 Palopo	408,527,791	449,242,430
Jumlah	12,665,298,573	13,931,816,229

Tabel 1.12. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	75,158,860	69,809,030
2 Bulukumba	65,051,440	75,444,820
3 Bantaeng	53,714,160	53,714,160
4 Jeneponto	76,294,860	72,023,040
5 Takalar	48,956,910	64,132,720
6 Gowa	67,662,600	80,227,530
7 Sinjai	46,854,480	55,315,050
8 Maros	51,205,510	78,426,630
9 Pangkep	78,201,060	72,547,490
10 Barru	40,354,837	50,755,420
11 Bone	88,244,460	86,315,710
12 Soppeng	49,276,640	43,719,300
13 Wajo	73,454,700	63,351,730
14 Sidrap	41,831,330	51,755,940
15 Pinrang	63,154,020	56,046,540
16 Enrekang	48,908,340	50,131,700
17 Luwu	59,690,400	68,010,320
18 Tator	55,955,450	58,947,980
19 Luwu Timur*	38,909,600	55,595,030
20 Luwu Utara	53,187,510	51,879,100
21 Toraja Utara	85,464,350	86,030,180
22 Makassar	40,886,880	64,792,920
23 Pare-Pare	45,798,230	32,485,350
24 Palopo	39,243,130	36,481,000
Jumlah	1,387,459,757	1,477,938,690

Tabel 1.13. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	66,043,881	73,694,887
2 Bulukumba	197,944,110	210,884,212
3 Bantaeng	69,348,255	90,150,369
4 Jeneponto	106,068,791	138,294,623
5 Takalar	115,744,927	110,307,155
6 Gowa	208,894,692	197,956,391
7 Sinjai	90,083,824	138,958,003
8 Maros	173,829,047	197,013,791
9 Pangkep	131,286,364	196,545,065
10 Barru	89,049,087	116,797,288
11 Bone	284,383,717	279,500,525
12 Soppeng	123,445,807	124,319,259
13 Wajo	163,186,203	224,271,294
14 Sidrap	129,785,220	149,725,141
15 Pinrang	137,809,157	164,771,092
16 Enrekang	101,272,244	123,445,811
17 Luwu	121,082,430	142,304,805
18 Tator	100,076,374	126,362,427
19 Luwu Timur*	190,570,463	184,597,188
20 Luwu Utara	93,104,528	115,823,318
21 Toraja Utara	93,515,705	123,577,235
22 Makassar	578,831,348	308,433,385
23 Pare-Pare	86,199,008	132,774,882
24 Palopo	85,899,054	110,677,296
Jumlah	3,537,454,236	3,781,185,442

Tabel 1.14. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	34,104,357	57,188,533
2	Bulukumba	40,861,230	50,000
3	Bantaeng	22,000,634	22,000,634
4	Jeneponto	7,829,484	50,132,935
5	Takalar	37,019,688	2,000,000
6	Gowa	166,307,395	117,041,194
7	Sinjai	33,697,104	27,399,146
8	Maros	20,039,601	31,298,070
9	Pangkep	42,793,055	4,939,560
10	Barru	47,075,160	52,952,121
11	Bone	71,838,987	47,475,465
12	Soppeng	55,540,262	27,452,276
13	Wajo	84,716,067	64,850,519
14	Sidrap	198,699	60,442,555
15	Pinrang	30,094,874	30,095,115
16	Enrekang	1,996,895	24,100,660
17	Luwu	120,116,963	49,810,168
18	Tator	15,195,865	36,544,500
19	Luwu Timur*	105,359,888	57,206,662
20	Luwu Utara	9,571,740	7,238,034
21	Toraja Utara	13,557,117	3,000,000
22	Makassar	229,415,973	229,950,000
23	Pare-Pare	2,245,918	22,293,627
24	Palopo	3,825,601	12,594,098
Jumlah		1,195,402,557	1,038,055,872

Tabel 2.1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	642,137,799	711,383,630
2	Bulukumba	964,391,399	1,022,219,326
3	Bantaeng	578,111,400	612,149,425
4	Jeneponto	729,821,356	871,316,866
5	Takalar	745,552,595	809,086,269
6	Gowa	1,251,789,279	1,269,036,166
7	Sinjai	696,182,152	785,689,380
8	Maros	899,586,476	1,068,326,227
9	Pangkep	956,595,991	1,039,106,107
10	Barru	659,082,615	741,638,489
11	Bone	1,464,703,896	1,511,809,025
12	Soppeng	817,239,930	1,009,467,244
13	Wajo	1,103,918,592	1,113,989,090
14	Sidrap	745,905,101	883,107,707
15	Pinrang	886,771,573	951,940,781
16	Enrekang	641,911,044	729,900,379
17	Luwu	900,289,393	900,151,534
18	Tator	675,080,917	759,431,924
19	Luwu Timur*	948,270,038	991,168,591
20	Luwu Utara	738,997,495	814,888,551
21	Toraja Utara	635,116,991	698,763,576
22	Makassar	2,579,183,491	2,396,879,800
23	Pare-Pare	616,759,765	717,429,351
24	Palopo	608,235,536	677,075,878
Jumlah		21,485,634,824	23,085,955,316

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	291,307,788	316,566,739
2	Bulukumba	530,649,538	579,566,389
3	Bantaeng	282,744,890	289,615,795
4	Jeneponto	407,222,585	458,740,110
5	Takalar	389,092,174	490,765,380
6	Gowa	606,370,021	702,271,323
7	Sinjai	379,536,667	463,195,215
8	Maros	456,666,841	496,738,445
9	Pangkep	465,671,769	563,151,482
10	Barru	355,898,943	443,567,164
11	Bone	826,398,904	997,491,786
12	Soppeng	452,060,155	471,323,754
13	Wajo	562,888,381	644,933,173
14	Sidrap	460,053,699	437,049,144
15	Pinrang	497,638,775	558,379,733
16	Enrekang	357,749,352	393,739,694
17	Luwu	467,712,120	524,946,217
18	Tator	349,045,001	417,573,393
19	Luwu Timur*	343,627,539	395,956,730
20	Luwu Utara	373,130,142	449,257,733
21	Toraja Utara	309,502,978	369,434,324
22	Makassar	859,025,797	912,428,208
23	Pare-Pare	314,363,619	378,842,559
24	Palopo	322,641,107	381,061,478
Jumlah		10,660,998,785	12,136,595,968

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	241,078,708	273,570,777
2 Bulukumba	481,165,753	530,595,917
3 Bantaeng	255,696,928	264,135,382
4 Jeneponto	373,210,864	436,534,730
5 Takalar	382,001,688	466,534,738
6 Gowa	579,880,207	674,725,379
7 Sinjai	356,947,418	445,963,963
8 Maros	437,222,118	465,508,445
9 Pangkep	447,403,551	537,800,485
10 Barru	316,309,972	402,104,840
11 Bone	776,378,305	857,216,226
12 Soppeng	433,956,669	460,425,966
13 Wajo	487,078,157	599,459,074
14 Sidrap	408,388,439	400,325,650
15 Pinrang	447,095,358	526,136,882
16 Enrekang	323,051,352	368,522,394
17 Luwu	394,036,151	482,216,657
18 Tator	336,538,426	392,095,408
19 Luwu Timur*	282,716,675	315,973,297
20 Luwu Utara	335,950,581	406,172,642
21 Toraja Utara	271,599,992	337,022,324
22 Makassar	785,235,490	885,934,100
23 Pare-Pare	299,079,987	364,787,823
24 Palopo	306,504,981	363,051,428
Jumlah	9,758,527,770	11,256,814,527

Tabel 2.4. Realisasi Belanja Bunga Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	0	0
2 Bulukumba	0	5,731,307
3 Bantaeng	97,473	97,473
4 Jeneponto	0	330,380
5 Takalar	57,400	57,400
6 Gowa	0	0
7 Sinjai	0	0
8 Maros	0	100,000
9 Pangkep	26,844	100,000
10 Barru	2,382,353	5,191,298
11 Bone	1,941,935	3,310,970
12 Soppeng	492,234	0
13 Wajo	104,359	200,000
14 Sidrap	2,395,752	3,654,000
15 Pinrang	52,683	47,851
16 Enrekang	0	0
17 Luwu	0	0
18 Tator	105,349	113,585
19 Luwu Timur*	0	0
20 Luwu Utara	0	0
21 Toraja Utara	0	0
22 Makassar	16,047,096	2,032,649
23 Pare-Pare	4,459,921	4,500,000
24 Palopo	4,473,037	7,000,000
Jumlah	32,636,436	32,466,913

Tabel 2.5. Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	547,847	0
2	Bulukumba	0	3,975,500
3	Bantaeng	0	0
4	Jeneponto	0	0
5	Takalar	0	0
6	Gowa	0	0
7	Sinjai	0	0
8	Maros	0	0
9	Pangkep	0	0
10	Barru	0	0
11	Bone	28,917,126	29,192,497
12	Soppeng	0	0
13	Wajo	0	0
14	Sidrap	0	0
15	Pinrang	0	0
16	Enrekang	0	0
17	Luwu	0	0
18	Tator	0	0
19	Luwu Timur*	0	0
20	Luwu Utara	25,000	35,000
21	Toraja Utara	0	0
22	Makassar	0	0
23	Pare-Pare	0	0
24	Palopo	0	0
Jumlah		29,489,973	33,202,997

Tabel 2.6. Realisasi Belanja Hibah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	1,115,750	0
2 Bulukumba	22,012,204	0
3 Bantaeng	10,649,607	7,355,902
4 Jeneponto	19,761,502	4,540,000
5 Takalar	1,589,625	2,540,000
6 Gowa	1,004,085	3,162,862
7 Sinjai	13,388,797	4,672,997
8 Maros	1,371,955	5,000,000
9 Pangkep	1,347,060	3,750,000
10 Barru	7,693,295	2,591,779
11 Bone	15,637,817	10,425,000
12 Soppeng	850,000	8,838,661
13 Wajo	41,154,719	10,818,744
14 Sidrap	22,957,644	2,698,000
15 Pinrang	29,504,025	5,245,000
16 Enrekang	15,873,631	4,000,000
17 Luwu	41,843,568	2,816,500
18 Tator	10,612,036	3,569,000
19 Luwu Timur*	1,655,000	3,757,974
20 Luwu Utara	5,090,576	5,955,000
21 Toraja Utara	16,334,146	6,753,650
22 Makassar	56,210,825	17,554,000
23 Pare-Pare	9,559,324	6,853,500
24 Palopo	10,650,792	4,500,000
Jumlah	357,867,983	127,398,569

Tabel 2.7. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	1,237,035	0
2 Bulukumba	1,013,805	1,715,223
3 Bantaeng	1,565,324	1,483,750
4 Jeneponto	720,379	1,755,000
5 Takalar	4,137,481	4,450,000
6 Gowa	1,831,417	1,901,050
7 Sinjai	822,592	531,000
8 Maros	2,392,509	3,000,000
9 Pangkep	2,809,096	2,438,250
10 Barru	354,099	511,747
11 Bone	2,053,750	4,350,000
12 Soppeng	692,500	841,000
13 Wajo	3,284,295	171,700
14 Sidrap	16,267,650	10,370,000
15 Pinrang	354,500	1,000,000
16 Enrekang	1,865,000	3,000,000
17 Luwu	1,520,750	1,856,750
18 Tator	90,600	2,892,600
19 Luwu Timur*	3,987,515	6,405,704
20 Luwu Utara	1,174,315	250,000
21 Toraja Utara	238,905	0
22 Makassar	791,193	1,150,005
23 Pare-Pare	7,000	52,000
24 Palopo	497,125	1,450,000
Jumlah	49,708,835	51,575,779

Tabel 2.8. Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	0	0
2	Bulukumba	26,457,776	5,467,746
3	Bantaeng	13,655,363	1,702,109
4	Jeneponto	0	0
5	Takalar	377,188	406,524
6	Gowa	0	1,675,444
7	Sinjai	355,937	0
8	Maros	0	0
9	Pangkep	345,312	345,313
10	Barru	217,812	0
11	Bone	0	1,742,500
12	Soppeng	260,313	262,101
13	Wajo	0	0
14	Sidrap	8,306,852	0
15	Pinrang	0	450,000
16	Enrekang	15,474,688	0
17	Luwu	0	2,270,608
18	Tator	1,042,523	2,082,800
19	Luwu Timur*	6,632,896	7,300,000
20	Luwu Utara	695,950	1,776,343
21	Toraja Utara	1,844,580	2,526,400
22	Makassar	0	0
23	Pare-Pare	0	0
24	Palopo	0	0
Jumlah		75,667,190	28,007,888

Tabel 2.9. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	47028448	41995962
2	Bulukumba	0	31,580,696
3	Bantaeng	0	13,141,179
4	Jeneponto	13529840	14580000
5	Takalar	443,292	9,741,617
6	Gowa	23654312	20,306,588
7	Sinjai	7,727,423	10477255
8	Maros	14999699	20630000
9	Pangkep	12,377,576	16,717,434
10	Barru	28,885,312	30167500
11	Bone	888549	89,754,593
12	Soppeng	15,808,439	406,026
13	Wajo	29338760	31033655
14	Sidrap	467,641	15001494
15	Pinrang	18,552,741	23,000,000
16	Enrekang	443,318	16717300
17	Luwu	30311651	30,785,702
18	Tator	449,980	11,320,000
19	Luwu Timur*	48,635,453	61,019,755
20	Luwu Utara	30,138,720	34,068,748
21	Toraja Utara	19,411,950	22,131,950
22	Makassar	741193	757454
23	Pare-Pare	443029	649236
24	Palopo	515172	560,050
Jumlah		344,792,498	546,544,194

Tabel 2.10. Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	300,000	1,000,000
2	Bulukumba	0	500,000
3	Bantaeng	1,080,195	1,700,000
4	Jeneponto	0	1,000,000
5	Takalar	485,500	7,035,101
6	Gowa	0	500,000
7	Sinjai	294,500	1,550,000
8	Maros	680,560	2,500,000
9	Pangkep	1,362,330	2,000,000
10	Barru	56,100	3,000,000
11	Bone	581,422	1,500,000
12	Soppeng	0	550,000
13	Wajo	1,928,091	3,250,000
14	Sidrap	1,269,721	5,000,000
15	Pinrang	2,079,468	2,500,000
16	Enrekang	1,041,363	1,500,000
17	Luwu	0	5,000,000
18	Tator	206,087	5,500,000
19	Luwu Timur*	0	1,500,000
20	Luwu Utara	55,000	1,000,000
21	Toraja Utara	73,405	1,000,000
22	Makassar	0	5,000,000
23	Pare-Pare	814,358	2,000,000
24	Palopo	0	4,500,000
Jumlah		12,308,100	60,585,101

Tabel 2.11. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	302,803,963	392,816,891
2	Bulukumba	354,668,047	441,652,937
3	Bantaeng	288,203,196	322,361,304
4	Jeneponto	300,772,001	411,576,756
5	Takalar	280,867,106	316,265,817
6	Gowa	450,650,985	533,082,420
7	Sinjai	253,621,622	321,494,165
8	Maros	414,384,839	539,858,994
9	Pangkep	396,616,163	475,454,625
10	Barru	215,138,001	265,541,325
11	Bone	493,020,644	509,763,168
12	Soppeng	283024467	327,158,317
13	Wajo	386,037,051	468,857,035
14	Sidrap	278,598,122	416,058,563
15	Pinrang	316,422,459	362,144,070
16	Enrekang	231,646,290	305,457,965
17	Luwu	369,861,812	370,205,317
18	Tator	243,591,051	338,163,531
19	Luwu Timur*	390,762,593	584,406,861
20	Luwu Utara	350,609,186	365,580,818
21	Toraja Utara	295,515,400	326,329,252
22	Makassar	1,019,385,163	1,469,291,245
23	Pare-Pare	251,180,771	333,111,717
24	Palopo	258,727,446	288,508,241
Jumlah		8,426,108,378	10,485,141,334

Tabel 2.12. Realisasi Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	54,197,005	62,637,038
2 Bulukumba	53,984,352	58,478,480
3 Bantaeng	31,650,618	33,267,024
4 Jeneponto	44,297,517	12,481,887
5 Takalar	18,373,934	20,077,842
6 Gowa	25,339,237	25,098,509
7 Sinjai	19,153,549	17,371,910
8 Maros	28,010,940	19,465,102
9 Pangkep	59,001,351	40,597,500
10 Barru	17,811,471	12,540,107
11 Bone	15,738,937	21,257,745
12 Soppeng	39,448,970	40,838,997
13 Wajo	28,549,446	28,316,392
14 Sidrap	33,173,965	30,650,464
15 Pinrang	23,627,062	33,594,133
16 Enrekang	27,936,775	27,398,245
17 Luwu	28,981,951	18,169,700
18 Tator	29,767,291	29,942,968
19 Luwu Timur*	6,850,698	3,345,269
20 Luwu Utara	27,079,692	23,121,621
21 Toraja Utara	17,496,839	17,742,107
22 Makassar	189,524,832	191,584,535
23 Pare-Pare	17,962,687	14,503,723
24 Palopo	30,647,789	44,258,702
Jumlah	868,606,908	826,740,000

Tabel 2.13. Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	92,838,801	126,196,820
2	Bulukumba	153,185,935	184,035,697
3	Bantaeng	125,710,259	143,649,950
4	Jeneponto	108,977,650	234,525,195
5	Takalar	161,452,161	168,020,823
6	Gowa	179,179,428	170,284,979
7	Sinjai	126,284,141	163,090,804
8	Maros	126,596,424	193,819,226
9	Pangkep	129,394,945	183,708,572
10	Barru	95,806,755	120,762,102
11	Bone	196,094,329	284,621,703
12	Soppeng	119,691,142	119,034,958
13	Wajo	182,948,614	196,910,642
14	Sidrap	118,373,926	143,186,426
15	Pinrang	154,873,551	161,501,463
16	Enrekang	100,206,955	137,489,824
17	Luwu	189,430,193	193,276,044
18	Tator	95,813,662	117,838,234
19	Luwu Timur*	159,084,423	203,298,137
20	Luwu Utara	191,225,905	203,504,267
21	Toraja Utara	115,491,937	130,118,003
22	Makassar	595,174,088	756,378,681
23	Pare-Pare	137,444,514	195,002,614
24	Palopo	134,981,337	146,136,559
Jumlah		3,790,261,075	4,676,391,723

Tabel 2.14. Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2013- 2014
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2013	2014
1 Selayar	155,768,157	203,983,033
2 Bulukumba	147,497,760	199,138,760
3 Bantaeng	130,842,319	145,444,330
4 Jeneponto	147,496,834	164,569,674
5 Takalar	101,041,011	128,167,152
6 Gowa	246,132,320	337,698,932
7 Sinjai	108,183,932	141,031,451
8 Maros	259,777,475	326,574,666
9 Pangkep	208,219,867	251,148,553
10 Barru	101,519,775	132,239,116
11 Bone	281,187,378	203,883,720
12 Soppeng	123,884,355	167,284,362
13 Wajo	174,538,991	243,630,001
14 Sidrap	127,050,231	242,221,673
15 Pinrang	137,921,846	167,048,474
16 Enrekang	103,502,560	140,569,896
17 Luwu	151,449,668	158,759,573
18 Tator	118,010,098	190,382,329
19 Luwu Timur*	224,827,472	377,763,455
20 Luwu Utara	132,303,589	138,954,930
21 Toraja Utara	162,526,624	178,469,142
22 Makassar	234,686,243	521,328,029
23 Pare-Pare	95,773,570	123,605,380
24 Palopo	93,098,320	98,112,980
Jumlah	3,767,240,395	4,982,009,611

Tabel 2.15. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013- 2014 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2013	2014
1	Selayar	48,026,048	2,000,000
2	Bulukumba	79.073.814	1,000,000
3	Bantaeng	7.163.314	172,326
4	Jeneponto	21,826,770	1,000,000
5	Takalar	75,593,315	2,055,072
6	Gowa	194,768,273	33,682,423
7	Sinjai	63,023,863	1,000,000
8	Maros	28,534,796	31,728,788
9	Pangkep	94,308,059	500,000
10	Barru	88,045,671	32,530,000
11	Bone	145,284,348	4,554,071
12	Soppeng	82,155,308	210,985,173
13	Wajo	154,993,160	198,882
14	Sidrap	7,253,280	30,000,000
15	Pinrang	72,710,339	31,416,978
16	Enrekang	52,515,402	30,702,720
17	Luwu	62,715,461	5,000,000
18	Tator	82,444,865	3,695,000
19	Luwu Timur*	213,879,906	10,805,000
20	Luwu Utara	15,258,167	50,000
21	Toraja Utara	30,098,613	3,000,000
22	Makassar	700,772,531	15,160,347
23	Pare-Pare	51,215,375	5,475,075
24	Palopo	26,866,983	7,506,159
Jumlah		2,398,527,661	464,218,014

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulsel.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125
Telp. : (0411) 854838 Fax. : (0411) 851225